



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Laporan ini menggambarkan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 beserta permasalahan dan langkah perbaikannya.

Tanggapan (feed back) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan ini sangat diharapkan guna peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Blitar, 12 Februari 2024

PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR



Drs. NJUNARIADI

NIP. 196702241992031001

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 107 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- f. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- g. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- i. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- j. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- k. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

- Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - s. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
 - t. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - u. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
 - v. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - w. pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah; dan
 - x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang perumahan maupun kawasan permukiman diantaranya terdapatnya kawasan rawan kumuh, masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian, terdapat rumah tidak layak huni, terbatasnya penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada misi keempat yaitu **Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan** dan dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu Meningkatnya kelayakhunian dengan sasaran Meningkatnya akses rumah layak huni dan Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana,

sarana dan utilitas di kawasan permukiman, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar telah menyusun Rencana Strategis maupun Rencana Kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta sasaran yang hendak dicapai. Untuk mencapai sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman tersebut maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2023, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menguraikan pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 dari 3 sasaran, pertama Meningkatnya Rumah Layak Huni sesuai Standar dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni dari target 96,99 % terealisasi 98,13 % (capaian 101,18 %) tingkat efisiensinya sebesar 1,046. Kedua Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik dari target 73.94 % terealisasi 77,13 % (capaian 104,31 %) tingkat efisiensi 1,056. Ketiga Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP PD dengan target nilai 84,51 terealisasi dengan nilai 86,30 (capaian 102,12 %) tingkat efisiensi 1,053.

Keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah di tetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2023 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target indicator sasaran dapat disajikan dalam table berikut ini :

No	Sasaran	Permasalahan	Solusi
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni sesuai Standar	Terdapat fenomena penambahan data terus menerus dari usulan masyarakat	Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program
		Dampak negatif dari program stimulan ini adalah motivasi masyarakat untuk memperbaiki rumah secara mandiri menurun dan hanya mengandalkan adanya bantuan dari pemerintah	Diperlukan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah - Penguatan proses verifikasi penerima program

No	Sasaran	Permasalahan	Solusi
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Penanganan jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh dan pada perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan aset PSU nya telah diserahkan kepada pemerintah, namun untuk IKU mencakup jalan dan drainase lingkungan di semua kawasan perumahan dan permukiman	Perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antar PD dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	• Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk penyusunan strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja • Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	• Melakukan review target kinerja dalam perubahan renstra • Hasil capaian kinerja dinas disampaikan telah ke seluruh pegawai dalam rapat koordinasi realisasi capaian kinerja dan apel pagi • Setiap hasil monev yang dilakukan telah teridentifikasi hambatan - hambatan dalam pencapaian kinerja , dan sudah digunakan untuk menentukan strategi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) iii

Daftar Isi vi

Daftar Tabel vii

Daftar Lampiran viii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2

 C. Maksud dan tujuan 6

 D. Dasar Hukum 6

 E. Aspek – Aspek Strategis 8

 F. Isu – Isu Strategis 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11

 A. Rencana Strategis 2021 – 2026 11

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

 A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran 14

 1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 15

 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023 19

 3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra 20

 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM) 21

 B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome) 22

 1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan 22

 2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 23

 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 35

 C. Prestasi / Penghargaan 36

BAB IV PENUTUP 38

 A. Kesimpulan 38

 B. Langkah Perbaikan 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2023	5
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar	12
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 2.3	Program Tahun 2023	13
Tabel 3.1	Atribut Capaian masing-masing Indikator Kinerja	15
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 3.3	Jumlah Rumah dan Jumlah RTLH Kota Blitar Tahun 2023	16
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023	19
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	20
Tabel 3.6	Realisasi SPM Tahun 2023	21
Tabel 3.7	Alokasi per Sasaran Pembangunan	22
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	23
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35

Lampiran –Lampiran :

- A. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026
- B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap akhir tahun anggaran, sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang dimulai dari pengukuran kinerja sasaran strategis. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan dan evaluasi kinerja kebijakan daerah yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar.

Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 107 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

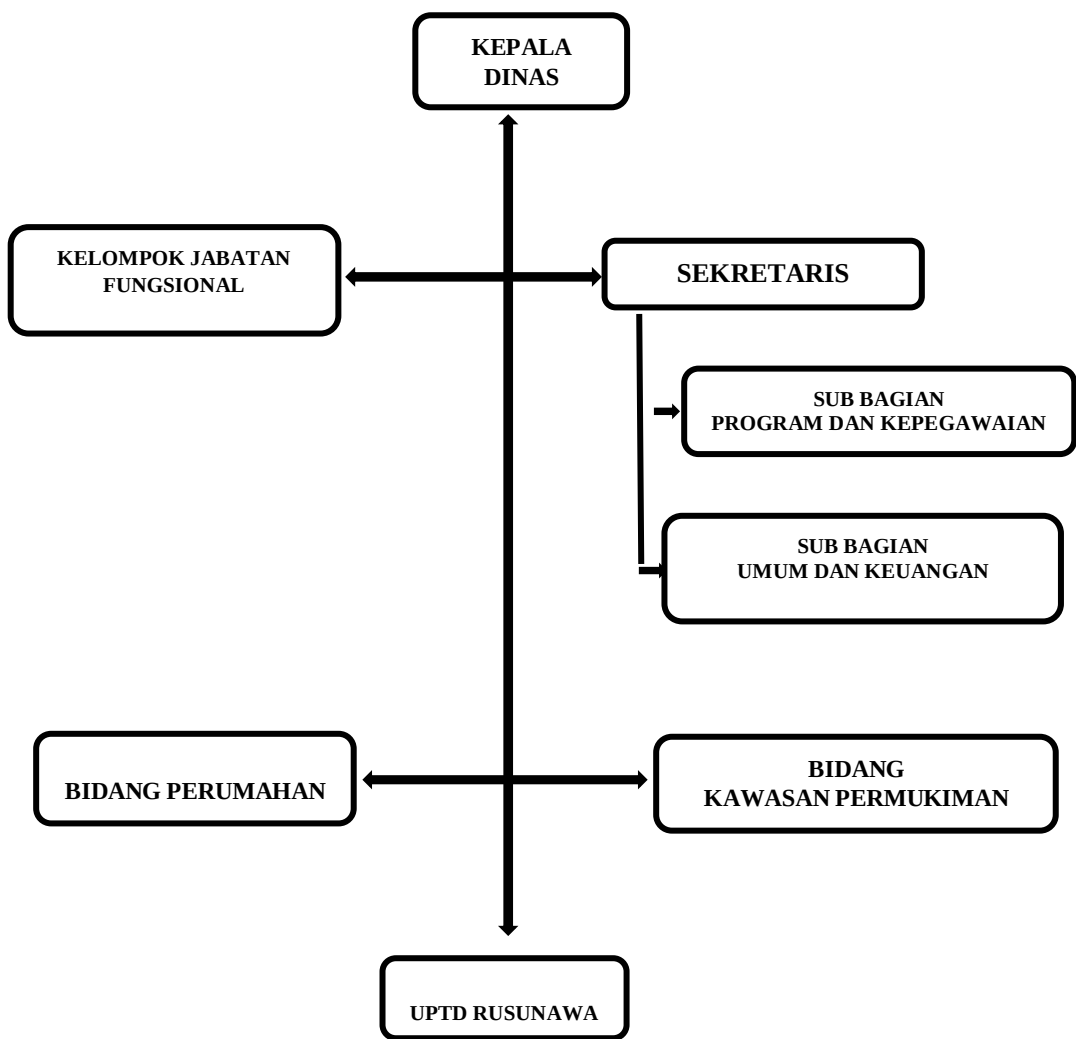
- e. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah Negara, komersial, umum dan khusus;
- f. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- g. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- i. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- j. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- k. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;

- r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- s. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
- t. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- u. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
- v. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- w. pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi **Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, 2 (dua) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan UPTD Rusunawa, sebagaimana struktur organisasi berikut :

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Blitar



Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berjumlah 26 orang dengan rincian 25 orang berstatus ASN dan 1 orang PTT. Adapun rincian sumberdaya aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Blitar
Tahun 2023

No	Pangkat/Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOL.RUANG				
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	1	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	0	1
3.	Pembina (IV/a)	1	1	2
4.	Penata Tk. I (III/d)	3	4	7

No	Pangkat/Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
5.	Penata (III/c)	0	0	0
6.	Penata Muda Tk I (III/b)	2	1	3
7.	Penata Muda (III/a)	4	2	6
8.	Pengatur Tk I (II/d)	2	1	3
9.	Pengatur (II/c)	1	0	1
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
12.	Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
13.	Juru (I/c)	0	0	0
14.	Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
15.	Juru Muda (I/a)	0	0	0
JUMLAH		15	10	25
TINGKAT PENDIDIKAN				
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	1	4
2.	Sarjana (S1)	7	7	14
3.	Diploma	2	1	3
4.	SLTA	2	1	3
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD	1	0	1
JUMLAH		15	10	25

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab kinerja yang telah di targetkan dan bagaimana proses pencapaiannya.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKj IP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan permukiman Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025 ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 107 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

E. Aspek – Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan pengampu SPM Bidang Perumahan Rakyat yang terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mendukung pencapaian SPM pada tahun 2023 meliputi :

- ✓ Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana di Ruang Majapahit Jl. A. Yani 20 Kota Blitar pada Kamis, 16 Maret 2023.
- ✓ Rapat Persiapan Pembentukan Tim Fasilitator Lapangan Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Singosari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar pada Kamis, 5 Januari 2023. Tujuan membentuk fasilitator lapangan adalah membantu dinas dalam tanggap darurat ketika terjadi rumah rusak akibat bencana.
- ✓ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Satgas dan Tim Fasilitator Lapangan di Rusunawa Kota Blitar pada Senin, 20 Maret 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami penanganan bencana mulai dari cara pendataan beserta pengamatan paska bencana kerusakan rumah menggunakan alat drone.
- ✓ Pendataan dan Verifikasi Rumah Potensi Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah yang bertempat di :
 - Kelurahan Kauman dan Kepanjelor (Lokasi Rumah sempadan sungai)
 - Ruang Rapat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar (untuk Rapat Koordinasi)
 - Ruang Rapat Fasilitator di Rusunawa (untuk sosialisasi masyarakat terkait pendataan) pada tanggal 25 Januari 2023 – 29 Desember 2023.

Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Rumah Potensi Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah ini

dilaksanakan bertujuan mengetahui rumah-rumah yang berpotensi rusak akibat bencana alam. Hal ini sangat penting supaya pemerintah daerah memiliki data mengenai rumah yang kondisinya kurang layak yang dapat berpotensi rumah apabila terjadi bencana alam.

F. Isu-isu Strategis

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah belum tertatanya kawasan permukiman sehingga permukiman layak huni di Kota Blitar masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya rumah tidak layak huni serta Prasarana Sarana Utilitas (PSU) terutama jalan dan drainase lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman dalam kondisi kurang baik.

Pemenuhan kebutuhan akan rumah di dalam kawasan permukiman menjadi issue yang terus berkumandang, Perumahan dan Permukiman, pengembangan permukiman pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi yang layak huni, aman, nyaman, damai serta berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya pembinaan penyelenggaraan perumahan, pembinaan penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, peningkatan kualitas yang dibarengi dengan peran serta masyarakat. Mengingat beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya : tingginya harga barang pokok, kondisi tata ruang, munculnya kantong daerah kumuh.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021 - 2026

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Blitar, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Keempat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

RPJMD KOTA BLITAR, MISI : 4 Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kelayakhunian	1. Meningkatnya akses rumah layak huni	1. Rasio Rumah Layak Huni	1. Meningkatnya akses rumah layak huni	1. Meningkatnya a rumah layak huni sesuai standar	1. Persentase rumah layak huni
	2. Meningkatnya kesediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di kawasan permukiman	2. Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	2. Meningkatnya kesediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di kawasan permukiman	2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	2. Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik
			3. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	3. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	3. Nilai SAKIP PD

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam pencapaian sasaran dan tujuan selama Tahun 2023 yang didukung dengan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman selama Tahun 2023 dan keselarasannya dengan pencapaian RENSTRA 2021-2026 diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	96,99 %
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	73,94%
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A 84,51

i. Program

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dijabarkan dalam 5 (lima) program sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Tahun 2023

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengembangan Perumahan	1.115.663.837
2	Program Kawasan Permukiman	2.997.683.734
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.206.203.726
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.543.453.101
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.625.004.260
JUMLAH		14.488.008.658

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD
- b. membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementrian Negara / Lembaga / Rencana Strategis SKPD

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1.Rumus 1

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2.Rumus 2

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 3.1 Atribut Capaian masing-masing Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar telah melaksanakan kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan/atau sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian masing-masing Indikator Kinerja

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	96,99	98,13	101,175
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	73,94	77,13	104,134
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A 84,51	A 86,30	102,118
Rata - rata capaian indicator sasaran strategis				102,476%

Capaian Kinerja Utama dan atau Sasaran Strategis selama tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Kinerja Utama Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar, dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni dengan formula indikator Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100% dengan realisasi 98,13% dari target 96,99% sehingga tercapai 101,175%.

Adapun jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni di Kota Blitar tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Rumah dan Jumlah Rumah Layak Huni Kota Blitar Tahun 2023

No.	LOKASI	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah	%
1.	Kota Blitar	40.144	40.909	98,13

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sudah mencapai target yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2023 jumlah rumah di Kota Blitar adalah sejumlah 40.909 unit sedangkan jumlah rumah layak huni sejumlah 40.144 unit sehingga Persentase Rumah Layak Huni adalah 98,13 %.

Faktor pendorong tercapainya target yang direncanakan adalah karena adanya dukungan partisipasi masyarakat untuk berswadaya membangun / meningkatkan rumah sendiri. Selain itu adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitasi dana subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (MBR) untuk mengikuti program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni baik melalui peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru berswadaya.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Terdapat fenomena penambahan data terus menerus dari usulan masyarakat
2. Dampak negatif dari program stimulan ini adalah motivasi masyarakat untuk memperbaiki rumah secara mandiri menurun dan hanya mengandalkan adanya bantuan dari

pemerintah

Adapun tindak lanjut yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program
2. Melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan Penguatan proses verifikasi penerima program

Adapun peran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni diantaranya adalah dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga menjadi layak, fasilitasi perbaikan rumah bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Selain itu juga disusun manajemen resiko pada peningkatan RTLH untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi yang mungkin berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai. Pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melakukan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 277 unit, pembangunan rumah swadaya untuk MBR sebanyak 16 unit dan memfasilitasi jaringan listrik untuk MBR sebanyak 10 unit. Disamping itu tahun 2023 terdapat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (**BSPS**) Kementrian PUPR di Kota Blitar untuk peningkatan 74 unit rumah sedangkan dari Program Rumah Sejahtera Terpadu Kemensos adalah 17 unit rumah sehingga akan membantu mempercepat tercapainya kelayakhunian di Kota Blitar.

- b. Kinerja utama Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman, dengan indikator Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik merupakan rata-rata jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik. Realisasi Capaian kinerja tercapai

104,134 % yang berasal dari perhitungan target 73,94% dengan realisasi 77,13 % pada tahun 2023. Pada tahun 2023 Bidang kawasan permukiman melakukan peningkatan jalan dan drainase sepanjang 1227,84 meter di kawasan kumuh, sedangkan Bidang Perumahan melakukan peningkatan jalan dan drainase di kawasan perumahan sepanjang 5229,805 meter. Dengan adanya peningkatan jalan dan drainase juga program RT Keren akan dapat mengurangi kawasan kumuh di Kota Blitar seluas 8,54 Ha. Sisa kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/338/HK/410.010.2/2020 adalah 54,51 Ha. Faktor pendorong pencapaian target adalah Adanya koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah Penanganan jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh dan pada perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan aset PSU nya telah diserahkan kepada pemerintah, namun untuk IKU mencakup jalan dan drainase lingkungan di semua kawasan perumahan dan permukiman, untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman.

- c. Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target A (84,51) berhasil mendapatkan nilai A (86,30) dengan capaian 102, 118 %. Sesuai dengan capaian kinerja pada dasarnya sudah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah yaitu:

1. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk penyusunan strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja;
2. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja,

perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun langkah yang diambil adalah :

- ✓ Telah dilakukan review target kinerja dalam perubahan renstra .
- ✓ Hasil capaian kinerja dinas disampaikan telah ke seluruh pegawai dalam rapat koordinasi realisasi capaian kinerja dan apel pagi
- ✓ Setiap hasil monev yang dilakukan telah teridentifikasi hambatan - hambatan dalam pencapaian kinerja , dan sudah digunakan untuk menentukan strategi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun factor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya komitmen dari semua jajaran yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan capaian tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2022 dan 2023**

KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	97,43 %	98,13 %
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	76,83 %	77,13 %
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	85,88	86,30

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu dari realisasi 97,43 % pada tahun 2022 menjadi 98,13 % pada tahun 2023. Sedangkan pada kinerja Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 2022 realisasi 76,83 % sedangkan tahun 2023 realisasinya 77,13 %. Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indicator Nilai SAKIP PD pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu dari realisasi 85,88 pada tahun 2022 menjadi 86,30 pada tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sampai dengan 2023 bila dibandingkan dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s.d 2023	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	98,79 %	98,13 %	99.33 %
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	89,89 %	77,13 %	85,80 %
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A 84,57	A 86,30	102,04 %

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sasaran strategis/kinerja utama pertama yaitu Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar tahun 2023 dengan realisasi 98,13 % bila

dibandingkan dengan target Renstra pada akhir periode telah mengalami kemajuan sebesar 99,33 %. Sedangkan pada kinerja Meningkatkan kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dari target Renstra 89,89 % telah tercapai 77,13 % dan mengalami kemajuan sebesar 85,80 %. Pada Sasaran Strategis Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Nilai SAKIP PD mengalami tingkat kemajuan 102,04 % jika dibandingkan antara realisasi tahun 2023 yaitu 86,30 dengan target Renstra pada akhir periode yaitu 84,57.

Selain menangani kawasan kumuh, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman juga melakukan pencegahan terhadap munculnya permukiman kumuh baru dengan melaksanakan koordinasi dengan program RT Keren dan OPD yang menangani peningkatan jalan dan drainase lingkungan di Kota Blitar dan melakukan pendataan kawasan yang berpotensi munculnya kawasan kumuh baru.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Pada tahun 2023 tingkat pencapaian kinerja urusan perumahan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6 Realisasi SPM Tahun 2023

Indikator	Nilai Tahun Target Pencapaian	Perhitungan	Angka	Capaian Kinerja 2023
Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	100 %	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	Nihil	100 %
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100 %	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	Nihil	100 %

Pada tahun 2023 capaian kinerja SPM untuk indikator jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana terealisasi 100%. Pada tahun 2023 tidak ada laporan kejadian bencana yang melibatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sehingga capaian yang tertangani tetap 100 %. Sedangkan untuk fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah tidak ada yang terfasilitasi karena tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

3. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai taget kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman didukung dengan penganggaran yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.7 Alokasi per Sasaran Pembangunan

SASARAN		ANGGARAN	
URAIAN	INDIKATOR	Rp.	%
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	6.071.614.563	41,91
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	3.791.389.835	26,17
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	4.625.004.260	31,92
JUMLAH		14.488.008.658	100

Kinerja Utama Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar dengan alokasi anggaran Rp. 6.071.614.563,- (41,91 %), sedangkan kenerja Utama Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dengan alokasi anggaran Rp. 3.791.389.835,- (26,17 %) didukung oleh sasaran Meningkatnya kinerja

Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 4.625.004.260,- (31,92 %).

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja juga didukung dengan realisasi anggaran. Pada tahun 2023 pencapaian kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Sasaran 1 : Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	%	96,99	6.071.614.563	98,13	5.872.706.525	101,175	96,72
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	100	1.115.663.837	100	921.867.025	100	82,63
		Persentase tingkat hunian Rusunawa	%	95		95		100	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase data perumahan yang tersusun dan terupdate	%	75	17.350.015	75	17.222.800	100	99,27

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	R p	K	Rp
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	dokumen	1	17.350.015	1	17.222.800	100	99,27
	<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi</i>	%	100	29.999.754	100	28.696.000	100	95,65
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	100	29.999.754	100	28.696.000	100	95,65
	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase penyediaan jenis layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota</i>	%	100	149.999.719	100	434.500	100	0,29
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit rumah	10	149.999.719	0	434.500	0	0,29

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	R p	K	Rp
	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>	<i>IKM Pengelolaan Rusunawa</i>	<i>indeks</i>	80,57	918.314.349	86,26	875.513.725	107,0 6	95,34
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	dokumen	1	918.314.349	1	875.513.725	107,0 6	95,34
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	%	20,11	3.206.203.726	33,91	3.201.860.300	168,6 2	99,86
		Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	%	1,03		1,65		160,1 9	
	<i>Urusan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya</i>	<i>unit</i>	171	3.206.203.726	177	3.201.860.300	103,5 1	99,86
		<i>Jumlah masyarakat/ rumah tangga berpenghasilan rendah yang telah difasilitasi pembangunan rumah</i>	<i>unit</i>	15		16		106,6 7	

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	R p	K	Rp
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	unit	171	3.206.203.726	177	3.201.860.300	103,51	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	%	12.65	1.749.747.000	12,09	1.748.979.200	95,57	99,96
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Jumlah rumah tidak layak huni dikawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya</i>	<i>unit</i>	192	1.749.747.000	110	1.748.979.200	57,29	99,96

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	R p	K	Rp
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit rumah	105	1.749.747.000	110	1.748.979.200	104,7 6	99,96
2	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	73,94	3.791.389.835	77,13	3.737.428.645	104,3 1	98,58
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIM AN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	67,52	1.247.936.734	78,09	1.216.325.312	115,6 5	97,4 7
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	66,27		76,17		114,9 4	

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	R p	K	Rp
	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Jumlah laporan dan data base permukiman yang tersusun</i>	<i>dokumen</i>	4	143.450.240	4	139.007.000	100	96,9
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	dokumen	1	98.700.000	1	98.637.000	100	99,94
	Pembentukan /Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumu	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	laporan	2	7.800.000	2	5.300.000	100	67,95
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	laporan	2	36.950.240	2	35.070.000	100	94,91
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik</i>	<i>m</i>	67.664	1.104.486.494	104.245,40	1.077.318.312	154,06	97,54
		<i>Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik</i>	<i>m</i>	125.663		183.969,30		146,39	

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	R p	K	Rp
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan	2	91.601.849	2	86.730.900	100	94,68
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan /Dipugar	Ha	4,8	998.360.056	8,54	976.483.312	177,92	97,81
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	dokumen	1	14.524.589	1	14.104.100	100	97,1
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	64	2.543.453.101	86	2.521.103.333	134,375	99,12
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	64		87		135,94	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	m	15475	2.543.453.101	15922,63	2.521.103.333	102,89	99,12
		Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	m	21123		28134,82		133,19	

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	R p	K	Rp
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	9	2.404.522.289	9	2.385.095.433	100	99,19
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	laporan	12	138.930.812	12	136.007.900	100	97,9
3	Sasaran 3 : Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	A 84,51	4.625.004.260	A 86,30	4.486.252.715	102,1 2	97
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,57	4.625.004.260	85,73	4.486.252.715	106,8 6	97
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	35.275.080	100	34.887.200	100	98,9

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	R p	K	Rp
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15	12.637.540	15	12.486.000	100	98,8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	22.637.540	12	22.401.200	100	98,96
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	%	100	3.297.911.660	100	3.186.758.710	100	96,63
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	25	3.291.046.660	25	3.179.958.710	100	96,62
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Laporan	7	6.865.000	7	6.800.000	100	99,05

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	R p	K	Rp
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	%	100	98.576.600	100	98.515.000	100	99,94
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	76.410.000	2	76.410.000	100	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	49	22.166.600	49	22.105.000	100	99,72
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	%	100	319.328.037	100	310.438.613	100	97,22
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	8.670.000	1	8.670.000	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	24.077.300	3	24.067.300	100	99,96
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	13.045.100	4	13.045.100	100	100

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	30	53.000.000	31	53.000.000	103,3	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	20.548.500	1	20.024.500	100	97,45
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	dokumen	18	3.300.000	18	3.300.000	100	100
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	40	196.687.137	46	188.331.713	115	95,75
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</i>	%	100	40.850.000	100	40.850.000	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	40.850.000	2	40.850.000	100	100
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	%	100	663.597.643	100	650.621.477	100	98,04

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp	K	R p	K	Rp
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	26	53.013.643	24	45.379.185	92,31	85,6
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	247	610.584.000	247	605.242.292	100	99,13
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	%	100	169.465.240	100	164.181.715	100	96,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10	123.226.840	10	117.978.115	100	95,74
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	77	36.278.400	77	36.243.600	100	99,9
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	unit	2	9.960.000	2	9.960.000,00	100	100

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dilihat efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	101,18	96,72	1,046
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	104,13	98,58	1,056
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	102,12	97	1,053

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas adalah sebagai berikut :

- i. Sasaran 1 dengan indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni tingkat efisiensinya sebesar 1,046, bahwa dengan capaian kinerja 101,18% membutuhkan anggaran sebesar 96,72 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Pengembangan Perumahan, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Kawasan Permukiman.
- ii. Sasaran 2 dengan indikator kinerja Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik tingkat efisiensinya sebesar 1,056 dengan capaian kinerja 104,13 % membutuhkan anggaran sebesar 98,58 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pencapaian sasaran dikatakan efisien. Upaya yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

- iii. Sasaran 3 dengan indicator kinerja Nilai SAKIP PD tingkat efisiensi sebesar 1,053 dengan capaian kinerja 102,12 % dan capaian penyerapan anggaran 97 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pencapaian sasaran dikatakan efisien. Upaya yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor pendorong tercapainya efisiensi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan swadaya masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni
2. Pemahaman dan wawasan yang mumpuni untuk menjaga dan memelihara aspek-aspek kelayak hunian
3. Stimulus ekonomi lainnya yang meringankan kebutuhan masyarakat dalam hal sandang papan dan pangan
4. Adanya koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penanganan kawasan permukiman
5. Sinergitas antar bidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan

C.. Prestasi / Penghargaan

Selama tahun 2023 prestasi / penghargaan yang diperoleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah :

1. Predikat nilai A (Memuaskan) Terbaik ke 2 dari 30 OPD dengan predikat nilai A 86,30 (Memuaskan) dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.



WALIKOTA BLITAR

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

KEPADA:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

atas prestasinya dalam

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

dengan predikat nilai A (Memuaskan)

- Terbaik ke 2 dari 30 OPD -

Blitar, 25 September 2023

WALIKOTA BLITAR



Drs. I. A. SANTOSO, M.Pd





HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA BLITAR

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI	TOTAL NILAI
A	PERENCANAAN KINERJA	30%	28.18	86.30
B	PENGUKURAN KINERJA	30%	21.87	
C	PELAPORAN KINERJA	15%	15.00	
D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25%	21.25	

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
A	> 80 - 90	Memuaskan, menginspirasi perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
BB	> 70 - 80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
B	> 60 - 70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, tapi ketidaksiapan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
C	> 30 - 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
D	0 - 30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar



2. Ikut mendukung penurunan angka kemiskinan kota

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis capaian kinerja dapat disimpulkan pada sasaran 1 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni dari target 96,99 % telah terealisasi 98,13 % pada tahun 2023 atau tercapai 101,175 %. Sedangkan pada sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik dari target 73.94 % telah terealisasi 77,13 % atau tercapai 104,31 %. Dan pada sasaran 3 yaitu Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indicator Nilai Sakip PD dari target 84,51 terealisasi 86,30 atau tercapai 102,12 %.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2023 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai banyak kendala / hambatan dalam pelaksanaannya.

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat Dan kawasan Permukiman Kota Blitar diantaranya :

1. Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

2. Masih tingginya kawasan permukiman rawan kumuh karena infrastruktur yang kondisinya kurang baik terutama di kawasan padat penduduk, hal ini dikarenakan perkembangan persoalan penataan kawasan permukiman, Berdasarkan Keputusan Walikota Blitar nomor 188/338/HK/410.010.2/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Blitar sebagai acuan penghitungan kawasan kumuh di Kota Blitar masih tersisa seluas 54,51 Ha di akhir tahun 2023.

B. Langkah Perbaikan

Dalam menghadapi permasalahan di atas, terdapat beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu:

Tabel 4.1. Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Blitar

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (Murni)	Tahun 2024 (Perubahan)	Tahun 2025
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni sesuai Standar	- o Melaksanakan Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program - o Melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan Penguatan proses verifikasi penerima program	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	√		
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	o Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	√		

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (Murni)	Tahun 2024 (Perubahan)	Tahun 2025
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	- o Melakukan review target kinerja dalam perubahan renstra - o Hasil capaian kinerja dinas disampaikan telah ke seluruh pegawai dalam rapat koordinasi realisasi capaian kinerja dan apel pagi - o Setiap hasil monev yang dilakukan telah teridentifikasi hambatan - hambatan dalam pencapaian kinerja , dan sudah digunakan untuk menentukan strategi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√		

Demikian beberapa hal yang disampaikan dalam LKj IP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan misi Kota Blitar.

Blitar, 12 Februari 2024

PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR



Drs. NJUNARIADI
NIP. 196702241992031001

MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026

VISI : KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI : Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2023				2020	2023				
Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni/jumlah penduduk	0.242	0,250	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100%	96,05 %	96,99 %	Peningkatan akses rumah layak huni	1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak 2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak di kawasan permukiman kumuh 3. Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah 4. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 5. Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan 6. Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	63,3 %	74,47 %	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	63,3 %	73,94 %	1. Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan memadai 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase	1. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan permukiman 2. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan perumahan 3. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan permukiman 4. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan perumahan	- PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A 82,89	A 84,51	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A 82,89	A 84,51	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	

Blitar , 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR



Ir. ERNA SANTI, MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 196705161998032004

RENCANA KINERJA TAHUNAN TA 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR

No.	TUJUAN			Sasaran			Program Perangkat Daerah			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran
	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatkan akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0.25%	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	96.99 %	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100 %	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	75%	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	22,500,015
										Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100 %	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 orang	29,999,754
										Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan jenis layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	100 %	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 unit rumah	149,999,719
								Persentase tingkat hunian Rusunawa	95 %	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	80.37	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 dokumen	918,314,532
							PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	20.11%	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	180 unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	107 unit rumah	2,453,950,012
								Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1,03 %		Jumlah masyarakat/ rumah tangga berpenghasilan rendah yang telah difasilitasi pembangunan rumah	8 unit				
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	12.65%	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	332 unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	95 unit rumah	1,765,750,000
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak huni	74.47 %	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase	73.94 %	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	67.52%	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	8 dokumen	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 laporan	100,000,000
								Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	66.27%				Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	2 laporan	10,550,400

No.	TUJUAN			Sasaran			Program Perangkat Daerah			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran
	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2 laporan	35,828,800
										Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	125,663	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 laporan	14,902,730
											Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	67,664	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	4,8 ha	957,962,136
													Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 dokumen	51,440,341
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	64%	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	21123	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 lokasi	2,065,316,522
								Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	64%		Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	15475	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan PSU Perumahan	12 laporan	130,191,294
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah			Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A 84,51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B 80,57	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	12,637,540
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	37,637,540
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	3,353,046,660
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7 laporan	6,865,000
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	77,785,000
													Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	50 orang	22,651,453

No.	TUJUAN			Sasaran			Program Perangkat Daerah			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran
	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8,712,433
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	20,904,833
													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	13,304,880
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 paket	53,000,000
													Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	21,684,946
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	8,040,000
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	210,157,700
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	85%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	20,551,249
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	32,879,871
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 laporan	629,850,000
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	104,893,000
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 unit	36,488,800
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	2,460,000
													JUMLAH			13,380,257,160

Blitar, 2 Januari 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR

Y. ERNA SANUKI, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 196705161998032004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. ERNA SANTI, MT**
Jabatan : **Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Blitar, 20 Oktober 2023
**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Blitar,**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	96.99(%)
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	73.94(%)
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84.51(Indeks)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2,543,453,101.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3,206,203,726.00	Dana Insentif Daerah
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,997,683,734.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,115,663,837.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,625,004,260.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Total:		14,488,008,658.00	



Blitar, 20 Oktober 2023
 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Kota Blitar



PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET.	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100%	96.99 %	98,13%	101,18		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.115.663.837	921.867.025	82,63	Tidak terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan rumah sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan secara optimal
								PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.206.203.726	3.201.860.300	99,86	
								PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.749.747.000	1.748.979.200	99,96	

2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	73.94 %	77,13%	104,31		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.247.936.734	1.216.325.312	97,47	
								PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.543.453.101	2.521.103.333	99,12	
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	A 84,51	A 86,30	102,12		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.625.004.260	4.486.252.715	97,00	

Blitar, 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR



Ir. ERNA SANTI, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 196705161998032004